



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

NOMOR : 34/SEK/PENG.KP1.1.7/X/2024

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG
TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Mahkamah Agung membuka seleksi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 9.276 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) pegawai, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I.

II. KEBUTUHAN PPPK

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN.

III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 ADMINISTRASI NIAGA S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 AGRIBISNIS S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 AKUNTANSI S-1 ANTROPOLOGI S-1 ARKEOLOGI S-1 BAHASA DAN SASTRA S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM	3.750

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4
		S-1 BIOLOGI S-1 BUDIDAYA PERAIRAN S-1 BUDIDAYA PERTANIAN S-1 DAKWAH ISLAM S-1 DESAIN PRODUK S-1 EKONOMI S-1 FARMASI S-1 FILSAFAT S-1 FISIKA S-1 GEOFISIKA S-1 GEOGRAFI S-1 GEOLOGI S-1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 HUKUM S-1 ILMU AKTUARIA S-1 ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR S-1 ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU PERPUSTAKAAN S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU SOSIAL S-1 KEHUTANAN S-1 KEPERAWATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL S-1 KIMIA S-1 KOMPUTER S-1 KOMUNIKASI S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN S-1 MANAJEMEN S-1 MATEMATIKA S-1 NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN S-1 PENDIDIKAN S-1 PERIKANAN S-1 PERTANIAN S-1 PSIKOLOGI S-1 SEJARAH S-1 SISTEM INFORMASI S-1 SOSIOLOGI S-1 STATISTIKA S-1 SYARIAH S-1 TEKNIK S-1 TEKNIK ARSITEKTUR S-1 TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK FISIKA S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 TEKNIK LINGKUNGAN S-1 TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN S-1 TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN S-1 USHULUDDIN TAFSIR HADITS	
2	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI BISNIS D-III ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN D-III ADMINISTRASI KEUANGAN D-III ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PERADILAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI TATA PERKANTORAN D-III AGRIBISNIS D-III AGRONOMI D-III AGROTEKNOLOGI D-III AKUNTANSI D-III APMD ILMU SOSIAL D-III APMD SOSIAL D-III BAHASA DAN SASTRA D-III BISNIS INTERNASIONAL D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL D-III EKONOMI D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN D-III EKONOMI AKUNTANSI	429

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4
		D-III EKONOMI KEUANGAN D-III EKONOMI MANAJEMEN D-III EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI D-III EKONOMI MANAJEMEN KESEKRETARIATAN D-III EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN D-III EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBAND. D-III EKONOMI MANAJEMEN PERBENDAHARAAN D-III EKONOMI MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ELEKTRONIKA D-III GIZI D-III HIPERKES D-III HUBUNGAN MASYARAKAT D-III HUKUM D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA D-III ILMU KEARSIPAN D-III INFORMATIKA D-III KEARSIPAN D-III KEBENDAHARAAN NEGARA D-III KEBIDANAN D-III KEPARIWISATAAN D-III KEPERAWATAN D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III KEUANGAN D-III KEUANGAN PERBANKAN D-III KOMPUTER D-III KOMPUTER AKUNTANSI D-III KOMPUTER INFORMATIKA D-III KOMPUTER PROGRAMMER D-III KOMPUTER TEKNIK D-III KOMUNIKASI D-III MANAJEMEN D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN D-III MANAJEMEN INFORMATIKA D-III PELAYARAN NIAGA D-III PENGELOLAAN HUTAN D-III PERPAJAKAN D-III REFRAKSI OPTISI D-III SEKRETARIS D-III SISTEM INFORMASI D-III SOSIAL POLITIK D-III TATA AIR PERTANIAN D-III TEKNIK D-III TEKNIK ELEKTRO D-III TEKNIK INDUSTRI D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III TEKNIK KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN D-III TEKNIK MESIN D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN D-III TEKNIK PERTAMBANGAN D-III TEKNIK RADIOTERAPI D-III TEKNIK SIPIL D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN D-III TEKNOLOGI INFORMASI D-III TEKNOLOGI PERIKANAN D-III TEKNOLOGI PERTANIAN D-III TELEKOMUNIKASI D-III USAHA PERJALANAN WISATA	
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	4.383
4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	440
5	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR	274
JUMLAH TOTAL			9.276

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNPN, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak sedang menjalani dugaan pelanggaran disiplin dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin yang terverifikasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada lampiran II;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pelamar dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar dimulai tanggal **7 Oktober 2024** dan ditutup pada tanggal **20 Oktober 2024**;
2. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar masuk ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian;
3. Dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan wajib dibubuhkan *e-meterai* atau meterai konvensional;
4. Pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* atau meterai konvensional sebagaimana tercantum pada lampiran III;
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan surat keputusan

- penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Daftar Nilai atau Transkrip nilai asli dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai serta surat hasil nilai konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 5. Surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* atau meterai konvensional sebagaimana tercantum pada lampiran IV;
 6. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal (kemeja putih dan berdas) berlatar belakang merah;
 7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dan paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada lampiran V;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, yang menerangkan bahwa PPNPN terkait saat ini masih aktif bekerja dan memiliki masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih serta honorariumnya dibayarkan melalui DIPA Mahkamah Agung sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

VI. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi;
- B. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);

VII. KETENTUAN KELULUSAN

- A. Seleksi Administrasi
 1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 2. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
 3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang dipergunakan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- B. Seleksi Kompetensi
Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- C. Kelulusan Akhir
Penentuan pelamar yang lulus seleksi berdasarkan peringkat terbaik secara berurutan bagi:
 1. eks THK-II;
 2. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN dan masih aktif bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Dalam hal terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan.

VIII. MASA SANGGAH

Masa Sanggah merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir masing-masing tahapan seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. waktu yang diberikan untuk mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir masing-masing tahapan seleksi diumumkan;
2. panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. pengumuman ulang hasil akhir masing-masing tahapan seleksi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah dan bersifat mutlak.

IX. JADWAL SELEKSI

Mengacu Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, bahwa pelaksanaan pengadaan seleksi PPPK Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	7 s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	7 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	7 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id>, dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

X. LAIN-LAIN

- A. Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- B. Hal-hal yang perlu diperhatikan:**
1. Pendaftaran seleksi PPPK saat ini diperuntukkan bagi eks THK-II dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN;
 2. Pelamar dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda.
 3. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK. Apabila pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan Pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
 4. Dalam hal Pelamar sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
- C. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) penetapan kebutuhan jabatan;
- D. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Mahkamah Agung, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- E. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
- F. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
- G. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional;
- H. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- I. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
- J. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
- K. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>, dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
- L. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
1. *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
 2. *WhatsApp* : +62 822-1101-1667 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 3. *X* : @CASN_MA_RI;
 4. *TikTok* : @humasmahkamahagung;
 5. *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung.

- M. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung, pada laman <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
- N. Seluruh pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2024
Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto